

LAPORAN RENCANA KERJA (Rencana Kerja) TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp.(0334)8780990
LUMAJANG - 67316



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, diperlukan penyusunan Rencana Kerja sebagai jaminan obyektif untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 yang terangkum dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Kerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja dan kegiatan di Tahun 2022.

Lumajang, 11 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



YOGA PRATOMO, S.STP

Pembina Tk.I/IV/b

NIP. 19780910 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	18
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
2.4. Penentuan Isu – Isu Strategis	18
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	50
3.3. Program dan Kegiatan	51
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
4.1. Program Utama	57
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja	58
4.3. Alokasi Anggaran	61
BAB V : PENUTUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka secara sinergi pula Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra-PD) 2018 - 2023. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Atas dasar hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Rencana Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis PD. Dengan demikian RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Komunikasi.
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Meteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran RENJA PD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja program – program dan kegiatan – kegiatan yang akan di laksanakan pada waktu jangka 1 (satu) tahun kedepan serta sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021. Target dan Realisasi dapat di lihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel TC-.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun(tahun berjalan: 2021 - saat penetapan Renja 2022)
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan (2021)	Target Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu 2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegiat an/Sub Kegiatan tahun 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021 (Renstra PD)	Tingk at Capaia n Realis asi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(1 0/9)
2										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 6									
	Bidang Urusan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	1 6	1								
	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									

2	1	1	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98%					98%		
2	1	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jenis					7 Jenis		
2	1	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	3 dok	3 dok	100%	2 Dokumen	3	150%
2	1	1	0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen		
2	1	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1	100%
2	1	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Dokumen	1,3	67%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%					98%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25 ASN					23 ASN		

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitasi					2 Fasilitasi		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Fasilitasi					1 Fasilitasi		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis		1 laporan	1 laporan	100 %	1 jenis		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis		1 laporan	1 laporan	100 %	3 jenis		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%					98%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 Dokumen					2 Dokumen		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2 Fasilitasi					2 Fasilitasi		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%					98%		

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian	2 Fasilitas					2 Fasilitas		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1 Laporan					1 Laporan		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	3 ASN		4 orang	4 orang	100 %	3 ASN		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	10 ASN		4 orang	4 orang	100 %	10 ASN		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	11 ASN		4 orang	4 orang	100 %	11 ASN		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	98%					98%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis					10 Jenis		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis					4 Jenis		

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis					2 Jenis		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	1 Jenis					1 Jenis		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Fasilitas					1 Fasilitas		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	2 Fasilitas					2 Fasilitas		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	98%					98%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis					10 Jenis		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%					98%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	2 Fasilitas					2 Fasilitas		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening					3 Rekening		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	4 Fasilitas					4 Fasilitas		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	98%					98%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	4 Kendaraan		18 jenis	18 jenis	100%	4 Kendaraan	7	183%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	1 Jenis		18 jenis	18 jenis	100%	1 Jenis		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis		18 jenis	18 jenis	100%	3 Jenis		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	100%							
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	123 KIM	41 KIM	41 KIM	41 KIM	100%	82 KIM	55	67%

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah saluran opini yang dipantau	3 saluran					3 saluran		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konten informasi yang dipublikasikan	410					400		
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	12 agenda					12 agenda		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	6 Jenis Konten	400 konten	405 konten	405 konten	100%	6 Jenis Konten	270	4506 %
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dikelola	6 media	7 media publik	7 media publik	7 media publik	100%	6 media	7	95%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	222 ppid		122 ppid	122 ppid	100%	172 PPID	98	57%
Layanan Hubungan Media	Jumlah berita yang dipublikasikan	505 berita	400 konten				500 BERITA	133	27%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah	2 unsur					-		

Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	12 laporan					12 laporan		
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	41 KIM					41 KIM		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif, Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	500 partisipan					500 partisipan		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	100%							
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1 Domain dan 264 Subdomain					1 Domain dan 264 Subdomain		

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	1 Domain					1 Domain		
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1 Domain dan 264 Subdomain					1 Domain dan 264 Subdomain		
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website/aplikasi yang dipantau	54 Website					44 Website		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal	1 Pusat Data					1 Pusat Data		
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peserta pertemuan forum TIK	80 Orang		350 Orang	350 Orang	100 %	80 Orang	143	179%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 Pusat Data					1 Pusat Data		
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	80 Orang		350 Orang	350 Orang	100 %	80 Orang	143	179%

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	65 website/aplikasi		35 website/aplikasi subdomain	35 website/aplikasi subdomain	100 %	45 website/aplikasi	27	59%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Peserta Forum Smart City	80 Orang					80 Orang		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem		1 Sistem	1 Sistem	100 %	1 Sistem	1 sistem	100%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	28 Data		21 data	21 data	100 %	24 Data	15	63%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	28 Data					24 Data		
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dibina	80 Orang					80 Orang		
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral	28 Data					24 data		

	yang tersedia								
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM pengelola statistik sektoral sesuai kompetensi	3 Orang					0		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%					90%		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	30 PD		55 PD	52 PD	95%	10 PD	22	217%
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah informasi yang bersandi	375 informasi		55 informasi		15%	375 informasi	125	33%

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Peraturan					1 Peraturan		
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi	3 jenis					3 jenis		

Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa pada Kegiatan Pengelolaan Media Publik Realisasi kinerjanya sebesar 67%, target kinerja 2020 yaitu jumlah media publik yang dikelola 6 media publik, sedangkan Realisasi Capaian Kinerja yang dicapai adalah sebesar 4 media publik, tidak tercapainya target kinerja dikarenakan terjadi kerusakan pada beberapa media publik yang dikelola seperti videotron, maka solusi untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya dan tahun-tahun kedepan adalah dengan melaksanakan perbaikan/pemeliharaan pada media yang rusak.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel TC-.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021 (perkiraan)	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9+6)/2	(11)=(7)	(12)=(8)	(13)
1	Persentase penerapan SPBE oleh PD			90%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	
	1. Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu			80%	90%	100%	100%	80%	85%	100%	100%	
	2. Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik			83%	85%	88%	90%	83%	84%	88%	90%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang antara lain:

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

**Tabel
Pemetaan Permasalahan**

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	<p>1 Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat</p> <p>2 Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi</p>	<p>1.1 Secara geografi, kabupaten Lumajang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang diapit oleh dua gunung berapi (Gunung Semeru, Gunung Lemongan). Aksesibilitas di kawasan pemukiman warga di dataran tinggi merupakan tantangan bagi Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi.</p> <p>1.2 Adanya blank spot. Secara infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pedesaan dan perkotaan sangat berbeda. Di wilayah pedesaan tidak banyak ditemui menara-menara telekomunikasi, sebaliknya di wilayah perkotaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebar diseluruh wilayah perkotaan.</p> <p>1.3 Kondisi alam dapat menjadi faktor pembatas/hambatan</p> <p>1.4 Media informasi tidak sepenuhnya dapat diakses masyarakat</p> <p>1.5 Banyak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat baik melalui penyuluhan tatap muka langsung atau melalui saluran-saluran dalam jaringan (online)</p> <p>1.6 Membangun kesadaran dan kewaspadaan para aparat pemerintah daerah dalam rangka mencegah berbagai aksi penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan.</p> <p>2.1 Infrastruktur TIK yang belum maksimal menjangkau seluruh wilayah pedesaan, sehingga daya beli masyarakat pedesaan terhadap perangkat TIK (komputer, laptop, smartphone yang semakin meningkat tidak sebanding dengan pemanfaatan perangkat TIK</p>

		komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio	2.2	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan aplikasi yang tersedia
			2.3	Teknologi informasi dan komunikasi memiliki keunggulan sekaligus kekurangan
			2.4	Teknologi yang digunakan sudah tergolong usang dan kurang adaptif
			2.5	Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana guna pembaruan perangkat TIK
			2.6	Media publik dan Kelompok Informasi Masyarakat masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan sebar serap informasi yang jumlahnya sangat besar.
			2.7	Potensi resiko kebocoran data dan informasi terbuka lebar karena tidak adanya tindakan yang sama di antara satuan kerja perangkat daerah dalam melakukan pengamanan data dan informasi.
	3	Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek)	3.1	Tingkat pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbeda-beda, Ada kelompok atau individu tertentu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk hal-hal yang negatif, sehingga menimbulkan persepsi yang buruk terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
			3.2	Capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Lumajang relatif rendah
			3.3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun komunikasi dengan pemerintah melalui saluran dalam jaringan (online) seperti turut serta memberikan umpan balik, komentar, maupun reaksi terhadap semua akun media sosial yang di miliki pemerintah masih rendah
			3.4	Kedudukan susunan organesasi didaerah atau unit persandian masing-masing daerah berbeda.
	4	Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika	4.1	Tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola aplikasi
			4.2	Terdapat aplikasi yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah namun belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya

			4.3	Kurangnya kemampuan ASN dalam pengoperasian aplikasi
			4.4	Informasi yang diterima masyarakat sangat bergantung pada media
			4.5	Pemenuhan SDM berkopetensi ,perlunya pelatihan atau di diklatkan.
	5	Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.	5.1	Banyak terjadi ketidakseragaman data antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga diragukan keakuratan dan kevalidannya
			5.2	Data tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara data yang satu dengan yang lainnya
			5.3	Data tidak dikelola secara serius sehingga ketersediaan data yang mutakhir (<u>up to date</u>) masih kurang
			5.4	Masih enggannya banyak pihak dalam melakukan integrasi pengelolaan data lintas sektoral
	6	Belum optimalnya sistem persandian yang modern.	6.1	Masih enggannya banyak pihak dalam melakukan integrasi pengelolaan informasi lintas sektoral
			6.2	Di zaman modern keamanan informasi tidak hanya dilaksanakan oleh sandiman ,pengamanan bukan hanya di kamar sandi tetapi pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan TIK.
	7	Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.	7.1	Kurang optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
			7.2	Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur
	8	Kurangnya pemantauan program dan evaluasi kegiatan dan anggaran.	8.1	Kurangnya perhatian/ dukungan dari beberapa unit kerja.
			8.2	Kurang disiplinnya administrasi pelaporan realisasi kegiatan dan anggaran.

2.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena ada perubahan SOTK pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2						Bidang Urusan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
3						Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp3.111.173.949
4						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	98%	Rp9.927.180

5						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis dokumen perencanaan	7 Jenis	Rp3.535.200
6						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp1.819.200
7						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp864.000
8						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	Rp1.495.200
9						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	2 Dokumen	Rp2.213.580

10						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	Rp1.775.044.906
11						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25 ASN	Rp1.706.331.106
12						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitasi	Rp59.502.960
13						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 Fasilitasi	Rp4.380.000
14						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 jenis	Rp2.313.600

15						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 jenis	Rp2.517.240
16						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%	Rp7.130.560
17						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	2 Dokumen	Rp0
18						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	2 Fasilitasi	Rp7.130.560
19						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	98%	Rp59.759.050

20						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	1 Jenis	Rp50.050.000
21						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian	2 Fasilitas	Rp3.016.800
22						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	1 Laporan	Rp1.732.250
23						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	3 ASN	Rp4.960.000
24						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	10 ASN	Rp0

25						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	11 ASN	Rp0
26						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	98%	Rp229.205.340
27						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis	Rp4.303.310
28						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	Rp74.710.130
29						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	Rp23.876.600

30						Penyediaan Bahan/Material	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	1 Jenis	Rp2.102.100
31						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Fasilitasi	Rp2.250.000
32						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2 Fasilitasi	Rp121.963.200
33						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	98%	Rp439.859.673
34						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis	Rp439.859.673

35						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1 Jenis	Rp0
36						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	1 Jenis	Rp0
37						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	98%	Rp430.547.240
38						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 Fasilitasi	Rp2.939.000
39						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	Rp179.520.240

40						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4 Fasilitasi	Rp248.088.000
41						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	98%	Rp159.700.000
42						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	4 Kendaraan	Rp128.600.000
43						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah alat besar yang dipelihara	1 Jenis	Rp0
44						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Jenis	Rp31.100.000

45						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	1 Jenis	Rp0
46						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	100%	Rp2.715.018.201
47						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	123 KIM	Rp2.715.018.201
48						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah saluran opini yang dipantau	3 saluran	Rp35.178.000
49						Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	12 agenda	Rp124.185.600

50						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	6 Jenis Konten	Rp197.500.000
51						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah media publik yang dikelola	6 media	Rp230.000.000
52						Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	222 ppid	Rp131.062.580
53						Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah berita yang dipublikasikan	505 berita	Rp600.000.000
54							Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah frekuensi promosi yang dipublikasikan melalui media massa (DBHCHT)	4 kali	Rp346.685.400

55						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah	2 unsur	Rp72.000.000
56							Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	950 peserta	Rp356.399.813
57						Manajemen Komunikasi Krisis	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	12 laporan	Rp200.009.808
58						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah KIM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	41 KIM	Rp103.037.000

59						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif, Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	500 partisipan	Rp168.960.000
60							Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	50 komunitas	Rp150.000.000
61						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	100%	Rp3.686.564.738
62						Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp2.543.793.138

63						Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	1 Domain	Rp100.000
64						Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp14.160.000
65						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah	18 Perangkat Daerah	Rp2.529.533.138
66						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah website/ aplikasi yang dikelola secara terpadu	1 Pusat Data	Rp1.142.771.600
67						Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah website/aplikasi yang dipantau	54 Website	Rp19.824.000

68						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 Pusat Data	Rp551.697.600
69						Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta pertemuan forum TIK	80 Orang	Rp301.800.000
70						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	80 Orang	Rp9.000.000
71						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	65 website/aplikasi	Rp133.400.000
72						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah pengguna SPBE yang dibina	370 orang	Rp25.250.000

73						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah Peserta Forum Smart City	80 Orang	Rp101.800.000
74						Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta sosialisasi TIK	80 Orang	Rp0
75						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang			
76						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem	Rp302.112.559
77						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi	28 Data	Rp302.112.559

78						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	28 Data	Rp44.338.000
79						Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah SDM yang dibina	80 Orang	Rp102.830.559
80						Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	28 Data	Rp34.944.000
81						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah SDM pengelola statistik sektoral sesuai kompetensi	3 Orang	Rp0
82						Pengembangan Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah sarana dan prasarana statistik sektoral	1 Sistem	Rp120.000.000

83						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunika si dan Informatik a Kabupaten Lumajang			Rp50.556.516
84						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunika si dan Informatik a Kabupaten Lumajang	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	Rp50.556.516
85						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunika si dan Informatik a Kabupaten Lumajang	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	30 PD	Rp34.065.878
86						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Komunikas i dan Informatik a Kabupaten Lumajang	Jumlah informasi yang bersandi	375 informasi	Rp34.065.878

87						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	3 jenis	Rp16.490.639
88						Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Jumlah jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroperasi	3 jenis	Rp16.490.639

Berdasarkan Uraian tabel T-C.31, juga mendukung tentang program dan kegiatan yang mengacu pada pengarusutamaan gender Tahun 2022 yang terletak pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN LUMAJANG

Nama Perangkat Daerah: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Usulan Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja (ABAIKAN)	Besaran/ Volume	Catatan	
					PD Pengusul	Mekanisme
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Jaringan Fiber Optik)	Kec. Lumajang		9 titik akses (OPD)	Diskominfo	Forum PD

2	Sinergi terkait validitas data sehingga ada aplikasi/ fitur di website yang bisa digunakan untuk memvalidasi data UMKM di Kabupaten Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang		1 Sistem	DINKOP	Forum PD
3	Validasi data IKM melalui aplikasi agar bisa tersusun secara rapi sehingga data bisa lebih valid sehingga diharapkan ada aplikasi/ fitur di website yang bisa digunakan untuk memvalidasi data terkait hasil Tembakau	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang		1 Sistem	DINDAG	Forum PD
4	Berkolaborasi dengan media cetak/ media elektronik yang ditunjuk oleh Dinas Kominfo.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lumajang		4 Media cetak dan elektronik	DINKES	Forum PD
5	Sinergi dengan Dinas kominfo terkait dengan 4 kegiatan Dewan yang akan dilaksanakan Setwan yaitu : 1. Serap Aspirasi 2. Sosialisasi dari kegiatan Dewan 3. Talk Show, 4. Expose kegiatan DPRD.	LPPL Radio Suara Lumajang - Kec. Lumajang		1 Media	SETWAN	Forum PD
6	Ada blog time/ talkshow/ Iklan Layanan Masyarakat Khusus terkait topik yang berhubungan dengan kesehatan di LPPL Radio Suara Lumajang.	LPPL Radio Suara Lumajang - Kec. Lumajang		1 Media	DINKES	Forum PD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti/ moto Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

B. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian

isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan,

dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City*, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban misi ke tiga, yakni: “**Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good***

and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.”

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Tabel T-B.35), Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah:

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

Pemersalahan Pelayanan SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran	Permasalahan	Sebagai Faktor
----	---------	--------------	----------------

	Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
1.	Masih adanya kesenjangan komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat antara provinsi besar dengan provinsi yang masih tertinggal	Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan professional • Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD • Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo • Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
2.	Belum meratanya penyebaran teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil	Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK • Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan muatan e-Government • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
3.	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan		

	pemerintah an daerah	pemerintahan dan pelayanan publik	informatika seperti website, hosting dan colocation dll.	
4.	Belum siapnya daerah dalam menyusun rencana induk tata kelola TIK	Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK (Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025)	• Belum optimalnya layanan penyelenggar aan pos dan telekomunika si	

c. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD pada prinsipnya menilai kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan.

Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lumajang, perumusan skenario maupun rekomendasinya dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel
Telaah KLHS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target TPB	Indikator TPB	Data capaian	Strategi pencapaian	Program
Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Capaian 73,96. Belum terpenuhi untuk menjadi 80%	Mengembangkan <i>E-procurement</i> dengan memperluas akses kepada semua Masyarakat	1. Penyediaan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mengakses <i>E-procurement</i> 2. Peningkatan fasilitas pelayanan <i>E-procurement</i> 3. Penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai <i>E-procurement</i>
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal	100%, walaupun menurun dari tahun	1.a Memperluas akses data dan informasi pemerintah	1. Penyediaan fasilitas internet yang menjangkau semua

dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	sebelumnya 108,11	kepada masyarakat melalui website 1.b Meningkatkan layanan website agar mudah diakses oleh masyarakat	wilayah Penyuluhan mengenai website pemerintah 2. Penyuluhan mengenai webdiste pemerintah 3. Penyuluhan untuk edukasi masyarakat terkait dengan website pemerintah sebagai media bertukar informasi
	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.		1. Penambahan jaringan Internet 2. Peningkatan kecepatan jaringan internet 3. Penyediaan	Mempertahankan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ada

	yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.			fasilitas internetmurah	
--	--	--	--	----------------------------	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

a. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)”

b. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, Formula dan Target Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN 2022
Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	Persentase penerapan SPBE oleh PD	Jumlah PD Yang Sudah Menerapkan SPBE	100%
			$\times 100\%$ Jumlah Seluruh PD	
	Meningkatnya penyelenggaraan	Persentase PD pengguna sistem	Jumlah PD pengguna sistem elektronik	90%

	pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	elektronik yang terpadu	yang terpadu	X 100%	
			Jumlah PD yang ada		
	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	X 100%	85%
			Jumlah Badan Publik		

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

- Manajemen Komunikasi Krisis
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan:

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

Dengan Sub Kegiatan:

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - Dengan Sub Kegiatan:
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:

- a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pengadaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Tabel 4.1

Program Utama dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan Persandian

		Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/ dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	PROGRAM INFORMASI DAN	Meningkatnya cakupan dan pengembangan	Output: 1. Jumlah cakupan dan	82 KIM

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	KOMUNIKASI PUBLIK	pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	<p>pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat</p> <p>2. Jumlah konten informasi yang dipublikasikan</p> <p>Outcomes Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat</p>	<p>400 konten</p> <p>80%</p>
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pembangunan website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	<p>Output: Jumlah domain dan sub domain yang dikelola</p> <p>Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal</p> <p>Outcomes Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.</p>	<p>1 Domain dan 264 Subdomain</p> <p>1 Pusat Data</p> <p>90%</p>
3.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	<p>Output: Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi</p> <p>Outcomes Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi</p>	<p>24 Data</p> <p>1 Sistem</p>
4.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN	Meningkatnya perangkat daerah yang telah	<p>Output: 1. Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat</p>	<p>1 Peraturan</p>

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan 2. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Outcomes Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	10 PD 90%
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Output: 1. Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2. Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah 4. Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD 5. Persentase fasilitas Administrasi Umum PD 6. Persentase fasilitas pengadaan BMD 7. Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor 8. Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	98% 98% 98% 98% 98% 98%

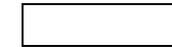
NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			<u>Outcomes</u> Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	

4.3 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 8,777,478,970,-** dengan seluruhnya digunakan untuk Belanja Langsung. Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel TC-.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.				100%	Rp 3.686.564.738
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola				1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 2.423.113.759
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	Mendaftarkan Domain lumajangkab.go.id melalui website domain.go.id		Dinas Kominfo	1 Domain	Rp 100.000

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	Monitoring Domain dan Subdomain		Dinas Kominfo	1 Domain dan 264 Subdomain	Rp 14.160.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah	Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Dinas Kominfo dan OPD Terkait (1. BLPBJ, 2. BAPPEDA, 3. BAGIAN UMUM, 4. BPKD, 5. KANTOR BUPATI, 6. DINKES, 7. DISARPUS, 8. PENDOPO BUPATI, 9. BPRD)	9 Titik	Rp 1.573.241.759
		Belanja Perangkat Penunjang Pusat Data (Data Center)	2	Dinas Kominfo		Rp 500.000.000
		As Number dan IP Address Internet	3	Dinas Kominfo		Rp 20.000.000
		Belanja Perangkat Firewall	4	Dinas Kominfo		Rp 112.112.000
		Belanja Perangkat APAR	5	Dinas Kominfo		Rp 200.000.000

		Lisensi zoom meeting	6	Dinas Kominfo		Rp 3.500.000
		Pemerataan ketersediaan akses internet	5	Dinas Kominfo		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal			Dinas Kominfo	1 Pusat Data	Rp 914.000.979
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website/aplikasi yang dipantau	Monitoring Website/Aplikasi yang dikelola secara optimal		Dinas Kominfo	44 Website	Rp 19.824.000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	Belanja pegawai analis sistem informasi dan jaringan & teknisi jaringan instalasi	1	Dinas Kominfo	1 Pusat Data	Rp 44.400.000
		Belanja Bandwidth data center	2	Dinas Kominfo		Rp 325.463.000
		Belanja Bandwidth DRC	3	Dinas Kominfo		Rp 151.800.000
		Belanja lisensi control panel	4	Dinas Kominfo		Rp 17.000.000
		Belanja SSL Comodo Positiv Wildcard SSL	5	Dinas Kominfo		Rp 2.500.000
		Belanja Paket SMS Nadine	6	Dinas Kominfo		Rp 72.000.000
		Belanja Paket SMS Broadcast	8	Dinas Kominfo		Rp 18.000.000
		Pemeliharaan Jaringan Komputer	7	Dinas Kominfo		Rp 41.413.979
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah peserta pertemuan forum TIK	Belanja konsultasi pendampingan SPBE	1	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 200.000.000

		Mengadakan rapat koordinasi	2	Dinas Kominfo		Rp 10.800.000
		Pemberian rekomendasi teknis pembuatan aplikasi di perangkat daerah	3	Dinas Kominfo		
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Mengadakan rapat koordinasi	1	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 10.800.000
		Pengintegrasian seluruh aplikasi Perangkat Daerah	2	Dinas Kominfo		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah website/ aplikasi yang dikelola secara terpadu			Dinas Kominfo	65 Website	Rp 349.450.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	Belanja pegawai analis sistem informasi dan teknisi produksi multimedia dan web	1	Dinas Kominfo	62 website/aplikasi	Rp 68.400.000
		Pendampingan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Secara Elektronik	4	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 50.000.000
		Belanja pengembangan aplikasi Lumajang Bersahabat	5	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 15.000.000
		Pendampingan GRMS	3	Dinas Kominfo	1 aplikasi	Rp 120.000.000
		Pendampingan Implementasi TTE	2	Dinas Kominfo	1 paket	Rp 50.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah pengguna SPBE yang dibina	Sosialisasi Implementasi TTE	1	Dinas Kominfo	60 orang	Rp 8.550.000

Daerah		Mengadakan bimtek Website Perangkat daerah/unit kerja/kelurahan	2	Dinas Kominfo	140 orang	Rp 6.500.000
		Mengadakan bimtek Nadine	3	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 3.800.000
		Mengadakan bimtek Website desa	4	Dinas Kominfo	240 orang	Rp 27.200.000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Peserta Forum Smart City	Belanja konsultansi pendampingan Smart City	1	Dinas Kominfo		Rp -
		Mengadakan rapat koordinasi	2	Dinas Kominfo		
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah peserta sosialisasi TIK				80 Orang	Rp -
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi			1 Sistem	Rp 302.112.559
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi			28 Data	Rp302.112.559
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	Menyusun laporan bulanan, semester dan tahunan Data Statistik Sektoral Dinas Kominfo	1	Dinas Kominfo	28 Data	Rp 10.318.000
		Menyusun buku saku data statistik sektoral	2	Dinas Kominfo	200 eks	Rp 24.420.000

		kabupaten				
		Melaksanakan monev data	3	Seluruh perangkat daerah	21 Kecamatan	Rp 9.600.000
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dibina	Belanja konsultasi pendampingan DMBOK	1	Dinas Kominfo	80 Orang	Rp 93.830.559
		Melaksanakan rapat koordinasi	2	Dinas Kominfo		Rp9.000.000
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	Belanja pegawai analisis statistik		Dinas Kominfo	28 Data	Rp 34.944.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM pengelola statistik sektoral sesuai kompetensi				3 Orang	Rp -
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah sarana dan prasarana statistik sektoral	Belanja aplikasi monev dan pelaporan analisis media online		Dinas Kominfo	1 Sistem	Rp 120.000.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat				80%	Rp 341.277.580
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok				123 KIM	Rp 341.277.580

	informasi masyarakat						
Penguatan kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Jumlah KIM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Melakukan pembinaan KIM Desa di tiap-tiap kecamatan	1	Dilaksanakan di 21 kecamatan se Kabupaten Lumajang	41 KIM	Rp	103.037.000
		Kampanye nasional terkait stunting	2	Kabupaten Lumajang			
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Melakukan pembinaan dan pemberian materi peningkatan kapasitas PPID Pembantu	1	Kabupaten Lumajang	71 PPID PEMBANTU	Rp	43.687.527
		Melakukan pembinaan dan pemberian materi peningkatan kapasitas PPID Desa	2	Peningkatan kapasitas PPID Desa dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan mengundang PPID terkait. Monev PPID Desa dilaksanakan pada desa yang telah memiliki SK PPID	151 PPID DESA	Rp	87.375.053

				Desa.		
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah saluran opini yang dipantau	Memantau 3 saluran opini melalui website (SP4N Lapor, Portal Lapor Lumajang, dan Group FB Lapor Lumajang)	1	Lumajang	3 saluran	Rp 35.178.000
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah	Membuat pertunjukan rakyat untuk sosialisasi "Pencegahan rokok ilegal dan pencegahan hoax" (B)	1	Kecamatan Lumajang	2 unsur	Rp 50.000.000
		Membuat konten positif seperti Iklan Layanan Masyarakat tentang "Pencegahan rokok Ilegal" (melalui youtube)	2			Rp 22.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				100%	Rp 50.556.516
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi				30 PD	Rp 34.065.878

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah informasi yang bersandi	Menerima, memeriksa, dan mengirim 375 informasi yang meliputi Email, faximile, dan radio.dan sewa tower serta pemeliharaan		Lumajang	375 informasi	Rp 34.065.878
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan				1 Peraturan	Rp 16.490.639
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaring komunikasi sandi pemerintah daerah yang beroprasi	Mengelola dan memantau jenis jaring komunikasi sandi yang beroperasi, yaitu jaring komunikasi pusat,serta belanja rutin telpon dan faximili	1	Lumajang	3 jenis	Rp 6.490.639
		Mengelola dan memantau jenis jaring komunikasi sandi yang beroperasi, yaitu jaring komunikasi provinsi,	2			Rp 5.000.000
		Mengelola dan memantau jenis jaring komunikasi sandi yang beroperasi, yaitu jaring komunikasi daerah	3			Rp 5.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat				100%	Rp 1.670.655.408

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat				123 KIM	Rp 1.670.655.408
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Melaksanakan liputan dan wawancara kepada narasumber/acara/kegiatan	2	Kabupaten Lumajang	12 agenda	Rp 124.185.600
		Belanja jasa tenaga administrasi	1			
		belanja lembur	3			
		Promosi Agropolitan	2			
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis konten informasi yang dipublikasikan	Belanja Pegawai Pengolah informasi dan komunikasi serta tenaga peliputan untuk membuat Konten-konten informasi yang diproduksi akan disebarluaskan melalui media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	1	Kabupaten Lumajang	6 Jenis Konten	Rp 166.800.000
		belanja perjalanan dinas dalam kota	2			Rp 30.700.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dikelola	Penyediaan karangan bunga			6 media	Rp 38.500.000

		Pembuatan dan cetak poster				Rp	3.795.000
		Pembuatan dan pemasangan media luar ruang				Rp	54.890.000
		Tenaga pengadministrasi umum				Rp	20.400.000
		Tenaga pengelola media center dan kemitraan media				Rp	21.600.000
		Pembayaran pulsa operasional admin media sosial				Rp	5.280.000
		Service videotron				Rp	55.535.000
		Service kamera				Rp	30.000.000
		Promosi KSPN	2	Dinas Kominfo			
Layanan Hubungan Media		Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Online	1			Rp	300.000.000
	Jumlah berita yang dipublikasikan	Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Cetak	2	Kabupaten Lumajang	505 berita	Rp	200.000.000
		Kerjasama publikasi dan promosi dengan media Elektronik (Radio dan Televisi)	3			Rp	100.000.000
		Promosi Perhutsos	2	Dinas Kominfo			
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	Melaksanakan pers rilis terkait isu terindikasi krisis		Kabupaten Lumajang	12 laporan	Rp	200.009.808

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif, Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	Belanja makanan dan minuman acara dialog interaktif	1	Kabupaten Lumajang	500 partisipan	Rp 132.000.000	
		Hadiah bagi fans Radio	2			Rp 36.960.000	
		Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terkait Mitigasi Bencana	2	Dinas Kominfo			
	Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	Honor Host Acara Komunitas			Radio suara Lumajang dan Kabupaten Lumajang	50 komunitas	Rp 74.000.000
		Belanja makanan dan minuman acara dialog interaktif					Rp 18.000.000
		Hadiah bagi fans Radio					Rp 12.000.000
		Belanja Back drop					Rp 7.500.000
		Belanja makanan dan minuman					Rp 22.000.000
		Belanja Paket Data					Rp 6.500.000
		Merchandise					Rp 10.000.000
Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran			Dinas Kominfo	100%	Rp 3.814.573.664	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			Dinas Kominfo	98%	Rp 14.292.180	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	Menyusun, mencetak dan menggandakan dokumen RENSTRA, RENJA dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya		Dinas Kominfo	7 Jenis	Rp 3.535.200	

		Mamin forum PD		Dinas Kominfo	97 orang/porsi	Rp	4.365.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Menyusun draft KUA PPAS Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni		Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp	1.819.200
		Menyusun draft KUA PPAS Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pergeseran		Dinas Kominfo	1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pelaksanaan penyusunan Dokumen perubahan RKA-skpd; Cetak dan penjilidan dokumen Perubahan RKA-SKPD; Belanja lembur petugas akuntansi keuangan		Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp	864.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Mecetak dan menggandakan dokumen LAKIP;		Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp	1.495.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	Mecetak dan menggandakan dokumen LPPD;		Dinas Kominfo	2 Dokumen	Rp	2.213.580
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Kominfo	98%	Rp	1.570.664.906

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pelayanan pembayaran gaji pokok, kenaikan golongan/berkala pegawai, gaji non PNS, BPJS Kesehatan		Dinas Kominfo	25 ASN	Rp 1.506.331.106
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Pelayanan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan		Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp 25.234.260
		Pelayanan pembayaran honorarium pengadaan barang/ jasa				Rp 16.952.700
		Pelayanan pembayaran lembur PNS				Rp 10.404.000
		Pelayanan pembayaran lembur non PNS				Rp 6.912.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinas Kominfo		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Menyusun dan mencetak Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Kominfo	1 jenis	Rp 2.313.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	Menyusun laporan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Kominfo	3 jenis	Rp 2.517.240
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Dinas Kominfo	98%	Rp 7.070.560
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Menyusun data Persediaan (Stock opname) Akhir Tahun		Dinas Kominfo		

		pada aplikasi sipkd				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Pelayanan administrasi keuangan untuk pengurus barang		Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp 7.070.560
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			Dinas Kominfo	98%	Rp 759.759.050
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	Membeli Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 50.050.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Melaksanakan pendataan kepegawaian pada SKPD dan Pelayanan administrasi keuangan untuk petugas pengolahan administrasi kepegawaian		Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp 3.016.800
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai	Penyusunan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai		Dinas Kominfo	1 Laporan	Rp 1.732.250
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat PIM III dan PIM IV serta Diklat Barang dan Jasa.		Dinas Kominfo	3 ASN	Rp 4.960.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	Sosialisasi ketentuan perundang-undangan kepada masyarakat	1	11 kecamatan	550 Peserta	Rp 700.000.000
	Jumlah frekuensi promosi yang di publikasikan melalui media massa (DBHCHT)	Publikasi dan promosi sesuai ketentuan di bidang cukai melalui media massa, perorangan dan kelompok	2	Kabupaten Lumajang	4 kali	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam rangka Bimbingan Teknis regulasi kepegawaian terkait Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Kominfo		Rp -
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD			Dinas Kominfo	98%	Rp 305.568.395
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	Pembelian alat-alat listrik dan elektronik kantor		Dinas Kominfo	10 Jenis	Rp 4.303.310
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	pembelian barang pakai habis alat tulis kantor,		Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 59.942.410

		pembelian barang pakai habis penyediaan materai,			1 Jenis	Rp	4.950.000
		pembelian barang pakai habis alat kebersihan dan bahan pembersih			1 Jenis	Rp	8.730.260
		pembelian barang pakai habis pangan (air minum)			1 Jenis	Rp	5.588.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	Penyediaan kegiatan Penggandaan fotokopi		Dinas Kominfo	2 Jenis	Rp	5.996.375
		Penyediaan kegiatan pencetakan				Rp	18.330.400
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	Pembelian/ penyediaan bahan bakar mesin dan pelumas		Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp	2.102.100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu		Dinas Kominfo	1 Fasilitasi	Rp	2.250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	Penyediaan fasilitasi pelaksana dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	2	Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp	15.970.000
		Penyediaan fasilitasi pelaksanaan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi skpd	1			Rp	180.805.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			Dinas Kominfo	98%	Rp	565.047.673
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	belanja modal meubelair (meja minimalis ruang kabid, meja receptionist, kursi		Dinas Kominfo	1 jenis	Rp	22.221.000

		pejabat eselon II dan III)				
		belanja modal penyimpanan perlengkapan kantor (sliding door, filling kabinet, lemari penyimpanan)			1 jenis	Rp 18.000.000
		belanja modal home use (UPS, Dispenser, Webcam, Splitter)			1 jenis	Rp 59.327.000
		belanja modal personal komputer/ PC 3 unit, Laptop			1 jenis	Rp 94.980.000
		belanja modal peralatan personal komputer (Printer, Scanner)			1 jenis	Rp 21.054.880
		belanja modal jaringan (Kabel HDMI)			1 jenis	Rp 3.000.000
		belanja modal peralatan studio video dan film (Kamera, lensa, Clip on, stabilizer, colour console, dsb)			1 jenis	Rp 140.114.713
		belanja modal alat pendingin (AC)			1 jenis	Rp 6.350.080
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	Pelaksanaan rehab gedung kantor		Dinas Kominfo	1 Jenis	Rp 200.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang disediakan	Pelaksanaan pembelian generating electric set		Dinas Kominfo	0	Rp -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Dinas Kominfo	98%	Rp 429.071.240
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	Penyediaan jasa paket/ pengiriman luar kota dan belanja lembur admin surat menyurat		Dinas Kominfo	2 Fasilitasi	Rp 2.939.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Pembayaran tagihan telepon		Dinas Kominfo	1 Rekening	Rp 19.110.000
		Pembayaran tagihan air (Radio)			1 Rekening	Rp 624.000
		Pembayaran tagihan listrik Radio Suara Lumajang dan 3 unit videotron			1 Rekening	Rp 158.466.240
		Pembayaran tagihan internet paket data admin surat menyurat				Rp 1.320.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran gaji tkb (sekretariat)		Dinas Kominfo	1 Fasilitasi	Rp 184.800.000
		Fasilitasi pembayaran jasa pelaksanaan transaksi keuangan			1 Fasilitasi	Rp 696.000
		Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi non asn.			1 Fasilitasi	Rp 54.120.000

		Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan bagi non asn.			1 Fasilitas	Rp	6.396.000
		pembayaran jasa pengolahan sampah, pembayaran iuran pengolahan sampah.			1 Fasilitas	Rp	600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD			Dinas Kominfo	98%	Rp	159.700.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	pembayaran jasa kir kendaraan operasional atau lapangan			1 kendaraan	Rp	1.000.000
		Pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor roda 4 kendaraan operasional atau lapangan;			4 Kendaraan	Rp	10.000.000
		Pembayaran pajak kendaraan bermotor STNK roda 2 kendaraan operasional atau lapangan;			14 kendaraan	Rp	4.200.000
		Pembayaran jasa service kendaraan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan			1 unit kendaraan dinas, 3 unit kendaraan operasional	Rp	54.000.000
		Pembelian BBM dan pelumas untuk kendararan dinas dan kendaraan operasional atau lapangan			4 Kendaraan	Rp	59.400.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	Pembayaran jasa pemeliharaan genset		Dinas Kominfo		Rp	-

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	pemeliharaan peralatan 18 unit personal computer dan penggantian suku cadang.	Dinas Kominfo	1 jenis	Rp	12.600.000
		pemeliharaan peralatan printer/ service printer 10 unit.		1 jenis	Rp	6.500.000
		Pemeliharaan pendingin ruangan 20 unit		1 jenis	Rp	12.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	Pengecatan bangunan/ gedung kantor	Dinas Kominfo		Rp	-

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lebih lanjut Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Lumajang, 11 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



NIP. 19780910 199802 1 001